

IDN/ANTARA



## POTENSI BISNIS KRIPTO

Pelaku bisnis Kripto, Nanda Rizal memantau grafik perkembangan nilai aset kripto, Bitcoin di Malang, Jawa Timur, Sabtu (12/3). Pelaku bisnis kripto tersebut mengatakan potensi perdagangan aset kripto sangat luas karena selain sudah ditetapkan sebagai komoditas yang legal oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag), bisnis tersebut juga memiliki potensi pasar yang terus tumbuh terutama di kalangan pengusaha muda atau kaum milenial.

## Airlangga: Generasi Muda Berkualitas Berperan Penting dalam Pertumbuhan Ekonomi

“Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Society 5.0. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan berkontribusi senilai Rp4.434 triliun kepada PDB Indonesia di 2030 atau setara dengan 16% dari PDB,” kata Airlangga Hartarto.

JAKARTA (IM) - Ekonomi digital merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan di masa pandemi ini. Seiring hadirnya era transformasi digital, Pemerintah juga terus mengakselerasi ekonomi digital Indonesia, salah satunya dengan pengembangan keterampilan digital pada Generasi Z atau Generasi Milenial. Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif mencapai lebih dari 191 juta orang dan sebagian besarnya merupakan Generasi Z. Hingga 2030, Indonesia diperkirakan membutuhkan talenta digital

sebanyak 9 juta orang. Selama masa pandemi ini ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan dalam hal digitalisasi, yaitu di bidang pendidikan (edutech) dan kesehatan (healthtech). “Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Society 5.0. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan berkontribusi senilai Rp4.434 triliun kepada PDB Indonesia di 2030 atau setara dengan 16% dari PDB. Peluang besar ekonomi digital Indonesia

ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada acara Kuliah Umum Akselerasi Pemulihan dan Transformasi Ekonomi melalui Dukungan Teknologi Digital yang diadakan di Universitas Hasanudin Makassar, Sabtu (12/3).

Dilansir dari laman Kemenko Perekonomian, disebutkan ekonomi digital Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi di ASEAN dengan nilai US\$70 miliar atau menguasai 40% dari pangsa ekonomi digital ASEAN. Nilai tersebut diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai US\$146 miliar pada 2025. Salah satu sektor pendatang baru yang tampil mengisir lanskap ekonomi digital Indonesia adalah sektor edutech, yang saat ini memiliki pengguna aktif dengan pertumbuhan signifikan mencapai 200% pada 2020.

“Pemerintah terus mendorong pengembangan talenta digital melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship,

dan Digital Leadership Academy. Namun, transformasi ekonomi memerlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, termasuk Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi juga bisa mendorong digitalisasi pada seluruh program pembelajaran mahasiswa maupun bidangnya,” ucap Airlangga.

La menambahkan, pengembangan talenta digital diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan digitalisasi UMKM di Indonesia. “Di era digital ini, generasi muda Indonesia harus mampu memanfaatkan talenta digitalnya, sehingga tidak hanya berperan sebagai job seeker saja, namun dapat juga menjadi job creator,” kata Airlangga.

Kewirausahaan dan UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi. UMKM Indonesia saat ini berjumlah sekitar 64,2 juta usaha dan berkontribusi 60,51% terhadap PDB atau senilai Rp9.580 triliun. UMKM juga berkontribusi terhadap penyerapan 97% dari total tenaga kerja yang ada dan dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Namun, saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia masih rendah, yakni 3,47% dari total populasi. Rasio kewirausahaan untuk sebuah negara maju minimal 5% dari total populasi.

UMKM sendiri masih mengalami berbagai tantangan dalam membangun sektor industri dan ekonomi,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Agus Gunawan di Jakarta, Minggu (13/3).

Beberapa waktu lalu, BPSDMI Kementerian bersama Prospera yang didukung Pemerintah Australia, menggelar Webinar Hari Perempuan Internasional 2022 bertajuk ‘Mematahkan Bias’ dalam TVET dan STEM (International Women’s Day Webinar 2022: ‘Break the Bias’ in TVET and STEM).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh unit pendidikan di lingkungan Kemenperin beserta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Tenaga Kerja.

## Erick Dorong PTPN Bangun Kemitraan Strategis Lewat Sawit Rakyat

JAKARTA (IM) - Menteri BUMN Erick Thohir mendorong PT Perkebunan Nusantara atau PTPN untuk terus membangun kemitraan strategis bersama UMKM dan petani rakyat lewat program Sawit Rakyat.

“Tentu tidak kalah pentingnya PTPN untuk terus membangun kemitraan strategis bersama UMKM serta petani rakyat melalui program Sawit Rakyat, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya para petani,” ujar Erick dikutip dari akun resmi PT Perkebunan Nusantara @holdingperkebunan di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (13/3).

Erick mengatakan, sebagai perusahaan perkebunan pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dirinya berpesan kepada PTPN agar terus melanjutkan kinerja positifnya dan program transformasi yang telah dijalankan. Hal ini penting dilakukan dalam upaya PTPN mendukung

ketahanan nasional baik di sektor pangan melalui swasembada pangan, serta di sektor energi khususnya mendukung energi baru terbarukan.

Selain itu, PTPN agar melakukan inisiatif inovasi dalam perkebunan kelapa sawitnya untuk mewujudkan industri sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Semoga PTPN dapat mewujudkan cita-citanya menjadi perusahaan agribisnis nasional berkelas dunia dan menjadi juara,” kata Erick.

Sebelumnya Erick mengungkapkan program sawit rakyat yang merupakan kolaborasi antara BUMN dengan rakyat dapat menciptakan keseimbangan pasar. Di mana sudah meluncurkan program hampir 3 bulan lalu yakni Sawit Rakyat bersama dengan BUMN.

Menurutnya, fungsi BUMN tidak hanya korporasi, tetapi BUMN harus bisa melakukan intervensi ketika pasar dalam kondisi tidak seimbang. ●dot

## Pupuk Iskandar Muda Pastikan Pabrik PIM-2 Beroperasi Normal

JAKARTA (IM) - Pabrik PIM-2 yang sebelumnya dikabarkan berhenti produksi dipastikan sudah siap beroperasi kembali demi mengamankan pasokan pupuk terutama di wilayah Sumatera Bagian Utara.

“Jumat kemarin sempat mati karena ada kendala teknis di internal, namun kini sudah siap berjalan normal kembali,” kata Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Budi Santoso Syarif, dalam keterangan tertulis, Minggu (13/3).

Budi mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kementerian ESDM selama ini untuk mengamankan pasokan gas untuk beroperasi pabrik-pabrik PT PIM. “Kami sangat berterima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri ESDM yang saat ini juga tengah mengupayakan datangnya lima kargo yang diperuntukkan bagi reaktivasi PIM-1,” kata Budi.

La mengatakan, dukungan yang diberikan Menteri ESDM untuk reaktivasi ini memang sangat luar biasa, apalagi mengingat situasi sulit akibat konflik di Eropa Timur dimana banyak negara justru sedang mengalami kekurangan pasokan gas. “Komunikasi kami dengan Kementerian ESDM dan juga SKK Migas cukup intens terkait hal ini,” ujarnya.

Budi juga menjelaskan bahwa reaktivasi Pabrik PIM-1 yang dilakukan beberapa waktu lalu, menggunakan LNG sisa dari alokasi kargo tahun 2021. “Alhamdulillah, pihak Kementerian ESDM akan mengupayakan pengalihan kargo dari tempat lain agar bisa digunakan oleh PIM-1,” kata Budi.

Sambil menunggu kargo, pabrik dimatikan dulu untuk melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan. “Karena pabrik sudah lama mati, jadi perlu dilakukan perawatan dengan lebih cermat. Berkat pasokan gas yang ada, PIM-1 sudah bisa beroperasi lagi setelah

mati suri selama 10 tahun, namun saat ini memang kami matikan lagi dan alokasi gasnya kami gunakan sebagai cadangan bagi PIM-2,” kata Budi.

Budi menambahkan, PT PIM di tahun 2022 menargetkan produksi urea sebesar 640 ribu ton. “Kami cukup optimis target tersebut dapat tercapai bila pasokan gas dan tambahan kargo bisa kami dapatkan,” katanya.

PIM juga sedang melakukan diversifikasi produk dengan membangun pabrik NPK berkapasitas 500 ribu ton per tahun. “Dengan adanya pabrik baru dan dukungan kuat dari Kementerian ESDM dalam penyediaan gas untuk reaktivasi PIM-1, insyaallah kami dapat semakin mantap mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk, terutama di wilayah Sumatera Bagian Utara,” katanya. ●pan

Selain itu, batas usia penganan yang dibatasi pada usia 23 tahun juga menjadi kendala yang menurutnya tidak ada aturannya. Sekarang ini, sambungannya, perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja lebih memercayakan lewat LPK, outsourcing di mana di dalamnya itu tidak menyerap tenaga kerja lokal. “Maka itu kita perlu bersatu, pemerintah daerah bersama stake holdernya. Mari kita buat masyarakat Kabupaten Bekasi ini meningkat kesejahteraannya,” harapnya.

Kendala yang terakhir, masih menurut Hendra, adalah soal penegakan hukum atau low enforcement dari Perpu Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2019 yang menurutnya tidak dijalankan di lapangan.

“Sekali lagi, ini perlu perhatian khusus, serius dari pemerintah bersama stake holder terkait. Saya berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi segera panggil pemilik-pemilik LPK yang ada di Kabupaten Bekasi,” ujarnya berharap. ●ADV

## Pengangguran Tinggi, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Minta Pemerintah dan Stakeholder Carikan Solusi



Hendra Cipta Dinata, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi.

CIKARANG PUSAT (IM) - Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dan stake holder yang ada untuk memberikan perhatian khusus guna dicarikan solusi terkait tingginya tingkat pengangguran lokal di daerah itu. Demikian Hendra Cipta Dinata, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten

Bekasi saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Jum’at (11/3).

Hendra mengatakan, tingginya tingkat pengangguran lokal di Kabupaten Bekasi yakni, sejumlah 220.000 orang dan mengambil posisi teratas se-Jawa Barat saat ini, sudah sangat memprihatinkan. Karena itu, sambungannya, Pemkab Bekasi dengan seluruh stake holdernya

duduk bersama mengatasi hal tersebut. “Kami dari Komisi IV terus mendorong Pemkab Bekasi dan stake holder yang ada untuk duduk bersama guna mencari solusi terkait hal itu. Kami yakin, optimis persoalan itu bisa diatasi, bisa dicarikan solusi, bila pemerintah dan pihak terkait benar-benar memberikan perhatian secara serius,” ujarnya.

Ditanya terkait daya saing atau sumber daya manusia tenaga kerja lokal yang ada, ia mengaku jika calon tenaga kerja lokal rata-rata lulusan sekolah lanjutan tingkat atas, SMA dan SMK. Sebab itu, lanjutnya, Kabupaten Bekasi sudah selayaknya memiliki universitas negeri. Sehingga, kata dia lagi, lulusan SLTA di wilayah itu bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang beruntung namun memiliki prestasi bisa difasilitasi pemerintah melalui beasiswa.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi baru memiliki satu balai latihan kerja

(BLK) yang menurutnya belum seimbang untuk 12 kawasan industri dengan jumlah 7000 an perusahaan yang ada di wilayah itu. BLK itu, sambungannya, hanya memiliki program etalasi listrik, body repair, las, teknis AC dan manajemen kantor yang hanya dapat menampung sekali diklat itu cuma 60 orang dan itupun dilaksanakan hanya dua kali setahun sesuai anggaran yang ada.

Kenyataan di lapangan yang menjadi kendala menurutnya, perusahaan hanya bisa menyerap tenaga kerja lokal itu hanya di kisaran 15-20 %. Perpu No. 9 Tahun 2019 itu, sebutnya, tidak menjadi acuan hukum yang bisa membuat efek jera bagi perusahaan. “Ini perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan stake holder yang ada di dalamnya. Karena kalau dibiarkan, ya, itu yang tadi saya bilang seperti pepatah, bagaikan tikus mati di lumbung padi, terkenal dengan kawasan industri terbesar se-Asia dan terkenal juga dengan penganggurannya yang tinggi di

Jawa Barat. Miris kita,” ujarnya.

Selain itu, batas usia penganan yang dibatasi pada usia 23 tahun juga menjadi kendala yang menurutnya tidak ada aturannya. Sekarang ini, sambungannya, perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja lebih memercayakan lewat LPK, outsourcing di mana di dalamnya itu tidak menyerap tenaga kerja lokal. “Maka itu kita perlu bersatu, pemerintah daerah bersama stake holdernya. Mari kita buat masyarakat Kabupaten Bekasi ini meningkat kesejahteraannya,” harapnya.

Kendala yang terakhir, masih menurut Hendra, adalah soal penegakan hukum atau low enforcement dari Perpu Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2019 yang menurutnya tidak dijalankan di lapangan.

“Sekali lagi, ini perlu perhatian khusus, serius dari pemerintah bersama stake holder terkait. Saya berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi segera panggil pemilik-pemilik LPK yang ada di Kabupaten Bekasi,” ujarnya berharap. ●ADV



**PULAUINTAN**  
General Contractor

**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

## Pelatihan Vokasi Optimalkan Peran Perempuan Bangun Daya Saing Industri

JAKARTA (IM) - Kesetaraan gender di Indonesia memiliki pengaruh terhadap peningkatan PDB nasional. Sebuah studi dari McKinsey Global Institute Report (2015), menyatakan bahwa kesetaraan gender diyakini menjadi salah satu faktor meningkatnya GDP sebesar USD135 juta pada tahun 2025.

“Oleh karena itu, kami terus menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, baik di dalam maupun luar negeri untuk dapat meningkatkan partisipasi peran perempuan dalam membangun sektor industri dan ekonomi,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Agus Gunawan di Jakarta, Minggu (13/3).

Beberapa waktu lalu, BPSDMI Kementerian bersama Prospera yang didukung Pemerintah Australia, menggelar Webinar Hari Perempuan Internasional 2022 bertajuk ‘Mematahkan Bias’ dalam TVET dan STEM (International Women’s Day Webinar 2022: ‘Break the Bias’ in TVET and STEM).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh unit pendidikan di lingkungan Kemenperin beserta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Tenaga Kerja.

Peserta lainnya berasal dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), VAPRO Internasional Indonesia, TVET System Reform Program-GIZ, ILO, Skill For Competitiveness Program (S4C) Swiss, ADB, UNESCO-UNEVOC dan ASEAN Secretariat.

“Webinar ini juga adalah sebagai wadah diskusi bagi kementerian, lembaga, organisasi, industri, serta unit pendidikan untuk membangun strategi-strategi peningkatan peran perempuan yang berfokus pada perempuan di SMK dan Politeknik, perempuan di dunia kerja, serta di dunia industri,” papar Arus.

Berdasarkan data BPS Agustus 2021, jumlah pekerja perempuan pada sektor industri mencapai 43,82% dari total pekerja sektor industri yang berjumlah 18,69 juta orang. Sementara itu, komposisi perempuan terdiri dari 12% dari semua lulusan jurusan terkait STEM di Indonesia.

“Melalui kegiatan webinar ini, BPSDMI Kementerian berupaya berkontribusi dalam peningkatan peran perempuan menempati posisi dan kualifikasi di hard STEM,” imbuh Arus.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian, Restu Yuni Widayati mengungkapkan bahwa telah banyak tindakan yang dilakukan pemerintah, industri, dan unit pendidikan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam bidang TVET dan STEM.

Misalnya, Prospera melaksanakan asesmen berbasis gender terhadap unit pendidikan di lingkungan Kemenperin dengan melakukan analisis awal terhadap data dosen, guru, dan siswa, serta program studi.

Kajian awal tersebut menunjukkan bahwa siswi perempuan mayoritas ada pada soft STEM, dan sedikit yang masuk dalam hard STEM.

“BPSDMI Kementerian juga bekerja sama dengan GIZ, Jerman menyelenggarakan Woman Innovation Camp yang fokus pada Internet of Things (IoT) didukung oleh Axioo dan Makeblock yang diikuti oleh para siswi dan tenaga pengajar di unit pendidikan Kemenperin,” ungkap Restu. ●hen

## SKK Migas Dorong TKDN Bisa Capai Rp45 Triliun

JAKARTA (IM) - Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong Kontraktor Kerja Sama (KKKS) meningkatkan target TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pengelolaan komponen barang, jasa Industri hulu migas.

Komitmen TKDN tahun 2022 diharapkan bisa mencapai 60% meskipun Pemerintah telah menetapkan target TKDN migas sebesar 57%. Nilai perkiraan pengadaan barang/jasa sebesar US\$5.200 juta atau setara dengan Rp75 triliun, jika komitmen TKDN 2022 bisa direalisasikan maka diperkirakan sekitar Rp45 triliun pengadaan barang/jasa akan dinikmati oleh industri nasional.

Dengan target TKDN serta nilai pengadaan yang lebih besar, maka manfaat industri hulu migas dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya industri nasional akan semakin meningkat. Dibandingkan dengan target TKDN Pemerintah sesuai Data Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, pada tahun 2022 dapat mencapai 50,9%, maka capaian TKDN hulu migas sudah melampaui dari yang ditargetkan Pemerintah.

Target TKDN ditahun 2022 ini menjadi tantangan dan dorongan bagi SKK Migas dan KKKS untuk terus berkomitmen melakukan proses rantai suplai sesuai dengan prinsip dasar dan etika pengelolaan rantai suplai yang efektif, efisien dan transparan dan mendukung tumbuhnya kemampuan nasional. Hal tersebut disampaikan Deputi Dukung Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko dalam rapat koordinasi program kerja Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas dengan pimpinan SCM (Supply Chain Management) KKKS dalam

industri, serta unit pendidikan untuk membangun strategi-strategi peningkatan peran perempuan yang berfokus pada perempuan di SMK dan Politeknik, perempuan di dunia kerja, serta di dunia industri,” papar Arus.

Berdasarkan data BPS Agustus 2021, jumlah pekerja perempuan pada sektor industri mencapai 43,82% dari total pekerja sektor industri yang berjumlah 18,69 juta orang. Sementara itu, komposisi perempuan terdiri dari 12% dari semua lulusan jurusan terkait STEM di Indonesia.

“Melalui kegiatan webinar ini, BPSDMI Kementerian berupaya berkontribusi dalam peningkatan peran perempuan menempati posisi dan kualifikasi di hard STEM,” imbuh Arus.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian, Restu Yuni Widayati mengungkapkan bahwa telah banyak tindakan yang dilakukan pemerintah, industri, dan unit pendidikan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam bidang TVET dan STEM.

Misalnya, Prospera melaksanakan asesmen berbasis gender terhadap unit pendidikan di lingkungan Kemenperin dengan melakukan analisis awal terhadap data dosen, guru, dan siswa, serta program studi.

Kajian awal tersebut menunjukkan bahwa siswi perempuan mayoritas ada pada soft STEM, dan sedikit yang masuk dalam hard STEM.

“BPSDMI Kementerian juga bekerja sama dengan GIZ, Jerman menyelenggarakan Woman Innovation Camp yang fokus pada Internet of Things (IoT) didukung oleh Axioo dan Makeblock yang diikuti oleh para siswi dan tenaga pengajar di unit pendidikan Kemenperin,” ungkap Restu. ●hen

## SKK Migas Dorong TKDN Bisa Capai Rp45 Triliun

JAKARTA (IM) - Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong Kontraktor Kerja Sama (KKKS) meningkatkan target TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pengelolaan komponen barang, jasa Industri hulu migas.

Komitmen TKDN tahun 2022 diharapkan bisa mencapai 60% meskipun Pemerintah telah menetapkan target TKDN migas sebesar 57%. Nilai perkiraan pengadaan barang/jasa sebesar US\$5.200 juta atau setara dengan Rp75 triliun, jika komitmen TKDN 2022 bisa direalisasikan maka diperkirakan sekitar Rp45 triliun pengadaan barang/jasa akan dinikmati oleh industri nasional.

Dengan target TKDN serta nilai pengadaan yang lebih besar, maka manfaat industri hulu migas dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya industri nasional akan semakin meningkat. Dibandingkan dengan target TKDN Pemerintah sesuai Data Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, pada tahun 2022 dapat mencapai 50,9%, maka capaian TKDN hulu migas sudah melampaui dari yang ditargetkan Pemerintah.

Target TKDN ditahun 2022 ini menjadi tantangan dan dorongan bagi SKK Migas dan KKKS untuk terus berkomitmen melakukan proses rantai suplai sesuai dengan prinsip dasar dan etika pengelolaan rantai suplai yang efektif, efisien dan transparan dan mendukung tumbuhnya kemampuan nasional. Hal tersebut disampaikan Deputi Dukung Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko dalam rapat koordinasi program kerja Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas dengan pimpinan SCM (Supply Chain Management) KKKS dalam

industri, serta unit pendidikan untuk membangun strategi-strategi peningkatan peran perempuan yang berfokus pada perempuan di SMK dan Politeknik, perempuan di dunia kerja, serta di dunia industri,” papar Arus.

Berdasarkan data BPS Agustus 2021, jumlah pekerja perempuan pada sektor industri mencapai 43,82% dari total pekerja sektor industri yang berjumlah 18,69 juta orang. Sementara itu, komposisi perempuan terdiri dari 12% dari semua lulusan jurusan terkait STEM di Indonesia.

“Melalui kegiatan webinar ini, BPSDMI Kementerian berupaya berkontribusi dalam peningkatan peran perempuan menempati posisi dan kualifikasi di hard STEM,” imbuh Arus.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian, Restu Yuni Widayati mengungkapkan bahwa telah banyak tindakan yang dilakukan pemerintah, industri, dan unit pendidikan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam bidang TVET dan STEM.

Misalnya, Prospera melaksanakan asesmen berbasis gender terhadap unit pendidikan di lingkungan Kemenperin dengan melakukan analisis awal terhadap data dosen, guru, dan siswa, serta program studi.